

## ABSTRAK

Notaris merupakan salah satu pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat segala jenis perjanjian yang berbentuk akta autentik, menetapkan tanggalnya, menyimpan akta-aktanya dan mengeluarkan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya itu sepanjang perbuatan akta itu tidak juga diwajibkan kepada pejabat-pejabat lain atau khusus menjadi kewajibannya. Namun sering kali terjadi notaris melakukan hal diluar kewenangannya, salah satunya sebagai pihak yang menerima penitipan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab notaris dalam hal menerima penitipan pembayaran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, lalu dikaitkan dengan teori yang sesuai agar dapat menarik hipotesis serta didukung data penelitian di lapangan, dan juga penyelesaian secara keperdataan jika terjadi sebuah sengketa.

Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Sumber data menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian pada kesimpulan pertama dan kedua.

Dalam hal penyetoran biaya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada dasarnya disetor oleh para penghadap klien notaris, namun dalam praktiknya sering ditemui bahwa notaris banyak dipercaya oleh para penghadap/klien untuk membayarkan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dari kliennya. Terkait hal ini, peraturan perundang-undangan tidak mengatur mengenai kewenangan seorang Notaris sebagai pejabat pembuat akta tanah untuk membayarkan pajak jual beli tanah dari kliennya atau penghadap, namun jika para penghadap/klien memberikan kuasa kepada notaris yang bersangkutan untuk mewakili untuk membayarkan pajak jual beli tanah yang berupa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ke kas negara, maka notaris yang bersangkutan pada dasarnya tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembayaran tersebut.

Kata kunci : notaris, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

## ABSTRACT

*The notary is one of the openbaar ambtenar who has the authority to make all kinds of agreements in the form of authentic deeds, set the date, keep the deeds and issue the grosse, copies and quotations, all of which as long as the deed is also not obligated to other officials or specifically be his obligation. However, it often happens that notaries do things outside their authority, one of which is as the party receiving the deposit of fees for the acquisition of land and building rights. The formulation of this research is to find out the responsibility of the notary in terms of receiving the custody of the payment of tax on land and building rights, then it is linked to the appropriate theory in order to draw hypotheses and is supported by research data in the field, as well as civil settlement in the event of a dispute.*

*The method used in this research is the approach method in this writing is normative juridical, the specification of this research is descriptive analytical research. The data source uses secondary data. Data collection techniques using literature study or document study. The data analysis technique used a qualitative descriptive approach. Research results on the first and second conclusions.*

*In terms of depositing fees, fees for the acquisition of land and building rights are basically paid by notary clients, but in practice it is often found that notaries are trusted by many tappers / clients to pay fees for acquiring rights to land and buildings from their clients. In this regard, the laws and regulations do not regulate the authority of a notary as a land deed maker to pay the tax on the sale and purchase of land from his client or the plaintiff, but if the tappers / clients authorize the notary concerned to represent to pay the land sale and purchase tax in the form of fees for the acquisition of rights over land and buildings to the state treasury, the notary concerned basically does not have the authority to make the payment.*

*Key words: notary, land and building acquisition fees*